

ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PRABUMULIH

Feriz Danisya Putri¹ Vivi Adeyani Tandean²

Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka¹

STIE Wiyatamandala²

ferizdanisya03@gmail.com¹ vivi.tandean@gmail.com²

ABSTRAK

Pemerintahan pusat memberikan aplikasi dalam penyampaian informasi pengelolaan keuangan daerah yang sudah terintegrasi dalam satu jaringan yang dapat menghubungkan pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sehingga informasi data kegiatan dan anggaran dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat langsung diawasi oleh pemerintah pusat. Dengan adanya aplikasi SIPD, pemerintah daerah dapat meningkatkan pertanggungjawaban atas informasi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang ditinjau dengan 3 dimensi yakni pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi serta untuk mengetahui hambatan dan strategi dalam mengelola hambatan pada aplikasi SIPD yang digunakan BPKAD Kota Prabumulih. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Prabumulih telah menerapkan aplikasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, namun pada dimensi sumber daya terutama pada indikator pada menu fasilitas belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap penggunaan sistem dan masalah terkait aplikasi SIPD yang sering mengalami error. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan pelatihan intensif, perbaikan infrastruktur teknologi, dan evaluasi sistem secara berkala guna mendukung kelancaran penerapan SIPD di masa mendatang.

Kata Kunci : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Efektivitas, Hambatan, Strategi

ABSTRACT

The central government provides an application in delivering information on regional financial management that has been integrated into a network that can connect regional governments with the central government, namely the Regional Government Information System so that information on activity and budget data in regional government financial management can be directly published by the central government. With the SIPD application, regional governments can increase accountability for regional financial management information. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) which is reviewed in 3 dimensions, namely goal achievement, integration, and adaptation and to determine the obstacles and strategies in managing obstacles in the SIPD application used by the BPKAD of Prabumulih City. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used for this study were interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that Prabumulih City has implemented the SIPD application in regional financial management according to Permendagri Number 77 of 2020, but in the resource dimension, especially the indicators on the facilities menu, it is not optimal, there is a lack of understanding of the use of the system and problems related to the SIPD application which often experiences errors. Therefore, it is recommended to conduct intensive training, improve technology infrastructure, and evaluate the system periodically to support the smooth implementation of SIPD in the future.

Keywords: Regional Government Information System, Effectiveness, Obstacles, Strategy

PENDAHULUAN

Indonesia sekarang ini sedang dalam proses pembangunan menuju pemerintahan *Good Governance*. Pemerintahan yang *Good Governance* mempunyai ciri khas pelaksanaan pemerintahan yakni transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas yang menjadi dasar dalam penerapan sistem tersebut. Penerapan *Good Governance* di pemerintah daerah khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan sangatlah berperan penting agar mencapai keuangan yang dilaporkan secara transparan serta akuntabel sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi daerahnya dengan baik.

SIPD merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa “pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling berhubungan untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah”. Setiap pemerintahan kabupaten/kota hingga provinsi diharapkan dapat menerapkan sistem informasi ini dalam tata kelola keuangan daerah. Penerapannya bertujuan agar tercapainya tata kelola keuangan secara efisien serta efektif dalam pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta dapat terwujudnya penilaian Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas penyajian laporan keuangan daerah.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 yang otomatis menggantikan Permendagri sebelumnya yaitu Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dan seluruh SKPD Kota Prabumulih termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Prabumulih sudah tidak menggunakan aplikasi SIMDA lagi, melainkan untuk sekarang ini menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja/lembaga pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Selain itu, penerapan SIPD diharapkan mampu menyatukan persepsi mengenai pengelolaan sistem informasi pemerintah daerah yang tepat dan menjadi sarana dalam mengintegrasikan serta mensinergikan penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai wujud penerapan sistem informasi pemerintah daerah menjadi lebih cepat, inovatif dan berkualitas. Penelitian terdahulu menggambarkan permasalahan SIPD juga terjadi di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara dimana pengelolaan keuangan daerah di BKAD Sumatera Utara cenderung dinilai masih kurang efektif, apabila dilihat secara keseluruhan melalui kendala-kendala yang dialami oleh BKAD

Provsu yang diantaranya yaitu belum tersedianya fitur-fitur yang dibutuhkan dari setiap bidang, sering terjadinya kendala teknis seperti belum bisa diaksesnya aplikasi SIPD, server yang masih sering error, jaringan server yang terkadang macet atau *loading* saat pengoperasian dan lain sebagainya, sehingga dalam pengimplementasian pun masih belum optimal. (Zuhra, Shalsadila & Irawan, 2024)

Dalam hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan Tumija, Asep Hendra & Marja Sinurat (2023) menunjukkan bahwa penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Semarang, sudah dilaksanakan, hal ini dilihat dari empat dimensi yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, namun ada permasalahan pada dimensi Sumber Daya terutama pada indikator fasilitas sistem infomasi AKLAP, menu yang digunakan sudah ada namun belum bisa diakses.

Menurut Nasution & Nurwani M (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan SIPD juga terjadi di BPKAD Kota Medan. Permasalahannya yakni adanya menu input SIPD yang perlu dilengkapi Jaringan SIPD sering mengalami error yang menyebabkan terhambatnya penyusunan anggaran kas, dan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Sijabat, J., Siringoringo, M.J.B., & Simanjuntak, G.F.R. (2024) mengenai penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan di DPRD Kota Medan, berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu Efisiensi Pengelolaan Keuangan dimana SIPD telah berhasil meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan di DPRD Kota Medan. Sistem ini memungkinkan pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan secara digital, yang mempercepat proses administrasi dan mengurangi risiko kesalahan manual.

Dalam penerapan aplikasi SIPD di BPKAD Kota Prabumulih memberikan banyak manfaat dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Prabumulih, yaitu memudahkan dalam penginputan data, ketepatan dalam perhitungan, kecepatan pemrosesan data, efisiensi dalam waktu dan biaya, transparansi anggaran, dan mempercepat proses penyusunan laporan keuangan yang digunakan sebagai sarana pengambil keputusan oleh pimpinan. Namun pada kenyataannya, masih ditemukan kendala dalam penerapan sistem informasi tersebut. Tidak semua pegawai dari Pemerintah Kota Prabumulih mahir dan mampu melakukan pengelolaan sistem ini.

Berkaitan dengan uraian di atas, memperoleh gambaran dalam penerapan SIPD. Oleh karena itu, tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini ialah mendapatkan gambaran efektivitas penerapan SIPD, hambatan dan strategi dalam mengatasi hambatan pada aplikasi SIPD Badan Pengelola Keuangan Daerah di Kota Prabumulih.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif menggunakan metode deskriptif serta pendekatan induktif. Menurut (Niam, F.M., et al, 2024) "Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan makna dari suatu fenomena dalam konteks alamiahnya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti

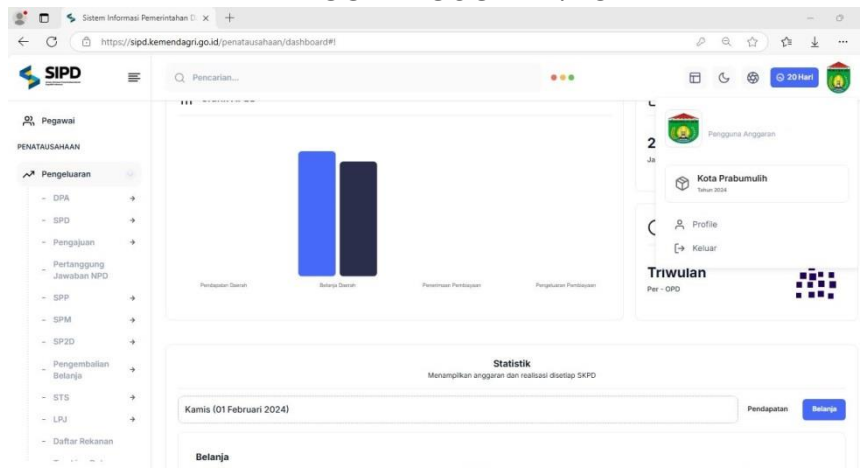
mengumpulkan data berupa teks, gambar, suara, atau bentuk data nonangka lainnya, untuk kemudian dianalisis dengan pendekatan induktif". Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini mengambil sumber data yang akan diamati bertempat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih. Informan dalam proses wawancara adalah pegawai yang memiliki peran krusial dalam penggunaan SIPD di BPKAD Kota Prabumulih. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Salah satu teknik utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara. Wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali informasi langsung dari sumber yang berkompeten dan relevan serta memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka secara lebih terbuka dan mendalam (Assyakurrohim et al., 2023).

Menurut Duncan dalam Steers dalam Zulkarnain (2022:32) dalam bukunya menyatakan ada tiga indikator sasaran dalam ukuran efektivitas yaitu Pertama, Pencapaian Tujuan, berupa suatu proses tercapainya tujuan akhir yang semakin terjamin, adapun tahapan tahapannya, baik dalam tahapan pencapaian dari bagian-bagiannya maupun tahapan dalam periodisasinya yang mencakup pandangan dalam keseluruhan pencapaian tujuan. Beberapa faktor dalam pencapaian tujuan yang terdiri dari Kurun waktu pencapaiannya, dan sasaran yang merupakan target konkrit. Kedua, Integrasi, berupa proses sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi yang merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi. Terakhir, Adaptasi, berupa peningkatan kemampuan dan sarana yang dilakukan oleh individu maupun organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan SIPD di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 terkait "Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung dan berkaitan untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah". SIPD merupakan suatu aplikasi yang sangat berguna bagi pemerintah daerah terkait tata kelola keuangan daerah. SIPD memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah pada penyusunan dan penyelenggaraan anggaran, serta pelaporan keuangan daerah berlandaskan asas ekonomis, efisiensi, transparan, *auditable*, efektif, dan akuntabel. Penerapan SIPD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih dapat dilihat gambar berikut.



Gambar 1. Dashboard pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Menurut grandis (2018) menyatakan bahwa suatu pengukuran dalam pencapaian suatu target, sasaran atau tujuan yang telah ditemukan sebelumnya merupakan efektivitas. Terkait dalam peningkatan penerapan SIPD, sesuai dengan Duncan dalam Steers dalam Zulkarnain (2012:32) mengatakan bahwa dapat dilihat dari tiga indikator sasaran dalam ukuran efektivitasnya. Berikut tiga indikator sasaran dalam mengukur efektivitas dalam penerapan SIPD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih.

1. Pencapaian Tujuan dalam Penerapan Aplikasi SIPD

SIPD bertujuan untuk memberi kemudahan dalam pelaksanaan proses tahapan perencanaan dan penatausahaan dalam pengelolaan keuangan daerah yang penginputannya telah terintegrasi di seluruh penjuror daerah. Berkaitan dengan dimensi pencapaian tujuan dan indikatornya yaitu, kurun waktu pencapaian, sasaran dan dasar hukum, penerapan aplikasi SIPD dalam meningkatkan laporan keuangan daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih belum dapat dikatakan efektif.

Hal ini disampaikan dari hasil wawancara penelitian kepada informan tentang bagaimana pelaksanaan SIPD dapat digunakan untuk mempermudah penyampaian informasi khususnya tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Prabumulih, informan pertama menyatakan bahwa Pelaksanaan SIPD perencanaan dan penatausahaan untuk saat ini masih aman. Namun, sewaktu-waktu server pusat dari SIPD mengalami gangguan yang menyebabkan SIPD ini tidak dapat diakses. Implementasi dari program yang dijalankan sudah berlandaskan Peraturan Walikota, Peraturan Gubernur dan Peraturan Menteri, serta terdapat petunjuk dalam pelaksanaannya dan terdapat teknis dari penerapan sistem tersebut. Sehingga standar dari kebijakan ini sudah jelas dan telah memenuhi kriteria yang terdapat pada indikator ini.

2. Integrasi dalam Penerapan Aplikasi SIPD

Pada dimensi integrasi dalam teori efektivitas Duncan dalam Steers dalam Zulkarnain (2012:32) belum efektif. Hal ini dapat dilihat pada indikator prosedur dan prosedur sosialisasi yang belum terwujud dengan baik. Prosedur penerapan SIPD belum tersampaikan dengan baik, sehingga pegawai di

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih belum paham secara mendalam dengan penerapan SIPD secara keseluruhan. Terdapat dalam hasil wawancara pada informan kedua yang menyatakan bahwa pelatihan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam penerapan SIPD ini hanya sebatas berbasis Video yang menyebabkan pegawai kurang bisa memahami prosedur penggunaan aplikasi SIPD ini dengan optimal, sehingga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih masih meraba aplikasi dan melihat tutorial pada aplikasi Youtube dalam pengelolaan keuangannya.

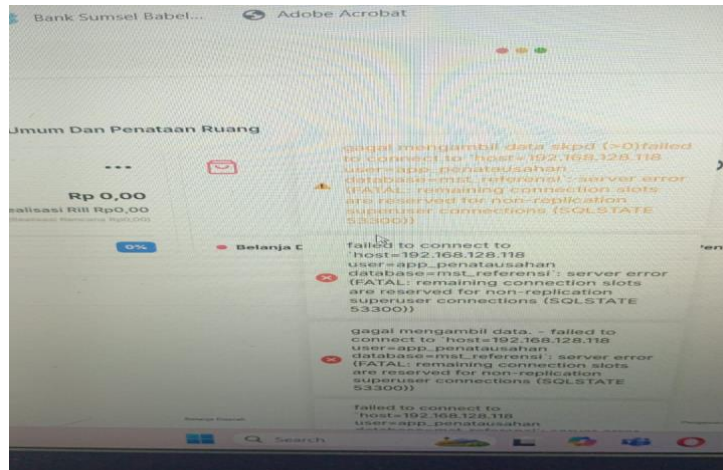
3. Adaptasi dalam Penerapan Aplikasi SIPD

Peningkatan kemampuan merupakan tolak ukur dalam tahap adaptasi. Peningkatan kemampuan ini dapat dilihat dari awalnya aplikasi pengelolaan keuangan berbasis software kemudian berkembang menjadi aplikasi pengelolaan keuangan yang berbasis web. Peningkatan kemampuan yang menjadi tolak ukur dalam penerapan SIPD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih belum meningkat signifikan. Hal ini disebabkan oleh dalam penerapan SIPD di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih masih mengalami hambatan seperti belum tercapainya pengelolaan keuangan secara keseluruhan, seperti hasil wawancara yang dikatakan pada informan ketiga dimana hanya proses perencanaan dan penganggaran yang dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, dalam penerapannya juga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih belum mencoba sampai ke tahap pelaporan jadi belum mengetahui output yang dihasilkan apakah masih tergolong memenuhi atau pencapaiannya yaitu kualitas laporan keuangan yang baik. Hal ini membuktikan bahwa SIPD dalam peningkatan kemampuan belum efektif penerapannya di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih.

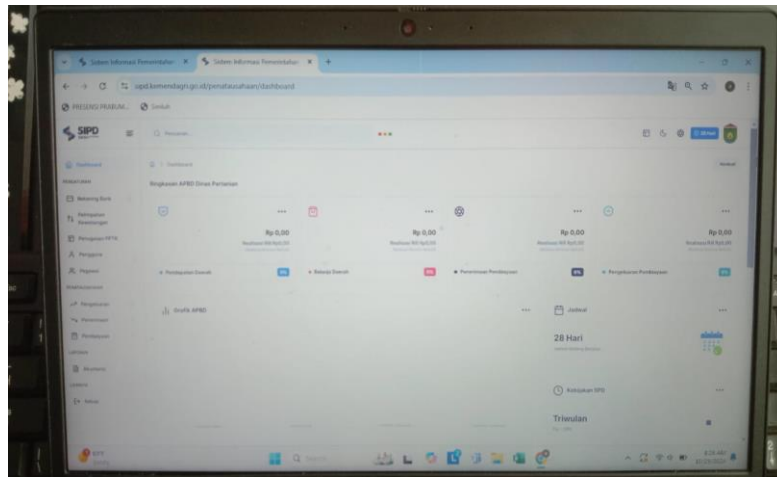
Hambatan dalam Penerapan SIPD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih

Adapun faktor penghambat dalam penerapan SIPD di Kota Prabumulih diperoleh informan-informan yang telah diwawancarai, yang pertama belum dilaksanakan pelatihan dan sosialisasi mengenai penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan rutin. Salah satu faktor penghambat yaitu sumber daya manusia yang belum memiliki penguasaan dalam penerapan aplikasi SIPD dikarenakan belum dilaksanakan pelatihan dan sosialisasi mengenai penerapan SIPD. Pelatihan dan sosialisasi yang rutin sangat mendorong pegawai dalam memahami penerapan aplikasi SIPD.

Kedua, belum adanya tindak lanjut dari Pemerintahan Pusat dalam laporan hambatan yang diberikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih. Laporan hambatan atas kendala kendala selama penerapan aplikasi SIPD telah dilaporkan, seperti server pusat yang mengalami gangguan dan sering terjadinya eror yang tetapi belum adanya respon maupun tindak lanjut dari Pemerintahan Pusat yang menyebabkan belum optimalnya server tersebut. Berikut gambaran hambatan yang terjadi pada saat mengakses dan menginput data pada aplikasi SIPD.



Gambar 2. Server error pada saat penginputan data pada Aplikasi SIPD



Gambar 3. Pagu dana yang harusnya tertera tidak muncul dalam aplikasi SIPD

Terakhir, belum dapat berjalan keseluruhan dikarenakan aplikasi yang digunakan baru saja digunakan. Pada tahap akuntansi, belum adanya petunjuk untuk dapat membuat laporan keuangan. Maka dari itu beberapa indikator efektivitas belum dapat dikatakan efektif.

Strategi dalam Upaya Meminimalisir Hambatan yang untuk Meningkatkan Penerapan SIPD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih

Adapun strategi yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih dalam upaya meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi dan meningkatkan penerapan SIPD yaitu :

1. Pelatihan dan Sosialisasi yang Rutin

Pemerintah Kota Prabumulih perlu mengadakan pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif dan rutin kepada pegawai terkait penggunaan aplikasi SIPD. Pelatihan ini harus dilakukan secara langsung dengan materi yang lebih komprehensif untuk memastikan pemahaman yang lebih baik dan efektif dalam penggunaan aplikasi.

2. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Mengingat adanya masalah teknis pada server pusat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih harus terus berkomunikasi dan melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait gangguan yang terjadi. Pemerintah pusat perlu segera menindaklanjuti laporan masalah server untuk memastikan kelancaran akses dan penggunaan aplikasi SIPD.

3. Peningkatan Fasilitas dan Petunjuk Operasional

Diperlukan petunjuk operasional yang lebih jelas dan detail, khususnya untuk tahap pelaporan dan akuntansi, agar pengguna dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, efektif, dan efisien. Selain itu, mengadakan sesi pelatihan langsung yang lebih interaktif dapat membantu mempercepat pemahaman terhadap sistem.

4. Evaluasi dan Pemantauan Secara Berkala

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih harus melakukan evaluasi dan pemantauan berkala terhadap penerapan SIPD untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Dengan demikian, dapat terus dilakukan perbaikan untuk mencapai efektivitas yang lebih optimal.

Dengan mengimplementasikan langkah strategi ini, diharapkan penerapan SIPD di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih dapat berjalan lebih efektif, mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dari uraian hasil data dan fakta yang ditemukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih memiliki tantangan dan hambatan yang perlu diatasi untuk mencapai efektivitas yang maksimal. Meskipun SIPD bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah dengan asas transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya efektif.

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih mengalami beberapa tantangan yang menghambat efektivitasnya. Meskipun SIPD bertujuan untuk mempermudah perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah, implementasinya di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih belum sepenuhnya efektif. Hal ini tercermin dalam beberapa dimensi yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, menunjukkan bahwa SIPD di Kota Prabumulih belum optimal. Pencapaian tujuan belum sepenuhnya efektif karena masalah teknis seperti gangguan server dan belum tercapainya kualitas laporan keuangan yang baik. Integrasi dan prosedur sosialisasi yang belum memadai menghambat pemahaman pegawai terhadap aplikasi ini, sedangkan adaptasi belum tercapai secara signifikan karena terbatasnya pemahaman dan penerapan aplikasi di seluruh tahap pengelolaan keuangan.

Beberapa faktor penghambat utama meliputi kurangnya pelatihan rutin, tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah pusat terkait laporan hambatan teknis, dan keterbatasan penggunaan aplikasi yang baru diimplementasikan.

Secara keseluruhan, meskipun SIPD memiliki potensi untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah, penerapannya di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih masih membutuhkan perbaikan dalam hal pelatihan, koordinasi, dan infrastruktur teknis agar dapat lebih efektif dan efisien.

Sebagai strategi untuk meminimalisir hambatan dan meningkatkan penerapan SIPD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih telah melakukan konsultasi dengan pemerintah daerah lain yang lebih berpengalaman, serta mengundang narasumber dari Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi berkala. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pegawai dalam mengoperasikan SIPD dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R., & Afgani, M. W. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(1), Pp. 1-9.
- Balqis, N., Zuhri, F., & Mauliyanda. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Vol. 11 (146-161)
- Grandis, E. T. (2018). Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Program Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 6 (103-113).
- Ishmaturadhw, M. (2021). Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang*
- M. I. Laoli, A. B. Ndraha dan Y. Telaumbanua. (2022). Implementasi SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintahan Kabupaten Nias (Studi Kasus BPKPD Sebagai Leading Sektor Penganggaran). *Jurnal EMBA*, Vol.10, No.4, Hal. 1381-1389.
- Nasution, M. I., & Nurwani M. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109–116.
- Niam, Fathun M., et al. (2024). Metode Penelitian Kualitatif. Penerbit Widina Media Utama: Kabupaten Bandung.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 95. Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Situmorang, D. M., & Amin As'ad. (2022). Analisa Revaluasi Valuta Asing Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara-Daerah (Uakbun-D). *JMari*, 3(2), 128–139.

Situmorang, D. M., & Al-Afgani, F. J. (2023). Implementation of System Digitalization in Payment and Deposit of Non-Tax Revenue from Minerals and Coal Resources. *Journal of Applied Management Research*, 3(1), 42–50. <https://doi.org/10.36441/jamr.v3i1.1546>

Tumija, Hendra, A., & Sinurat M. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Media Birokrasi*, 5(1), 79– 91.

Vitriana, N., Agustiawan, & M., Ahyaruddin. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Pekan Baru. *Jurnal Digital Bussiness*. 1(1), 4-5.

Zuhra, Shalsadila & Irawan. (2024). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. 24(2), 109-210.

Zulkarnain, 2022. Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Efektivitas Organisasi di Kantor Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.